

Belasan Pegawai Terancam Dibui

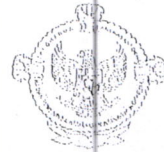
Dalam Kasus SPPD Fiktif

GIANYAR - Kasus SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) fiktif yang ditangani Polda Bali, sepertinya bakal menjadi pukulan telak Pemkab Gianyar, khususnya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Karena dalam waktu dekat, kasus ini bakal segera memasuki tahap kedua, dari penyidik Polda Bali ke Kejati Bali. Selanjutnya kasus ini akan dilimpahkan ke Kejari Gianyar, lantaran kasusnya terjadi di Gianyar. Tak tanggung-tanggung, 14 pegawai baik PNS hingga honorer Dispenda Gianyar kini terancam bui.

"Kasusnya sudah masuk tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti, Red) dari Polda Bali ke Kejati Bali, lalu ke Kejari Gianyar. Sesuai rencana tahap dua ini akan dilakukan 12 Oktober nanti," ucap Kajari Gianyar, Ketut Sumadana.

Disinggung mengenai informasi adanya 10 tersangka lagi yang juga masih pegawai Dispenda Gianyar, dan kemungkinan besar menyusul dilimpahkan, setelah 14 pegawai sebelumnya, Sumadana tak menampiknya. Dia pun menyebutkan, secara total ada 24 tersangka yang akan dilimpahkan dalam kasus pelesir ini. (wid/yes)

Edisi : Selasa, 6 Oktober 2011
Hal. : 31



BALAPAN DENGAN HUJAN: Pembangunan pompa air raksasa di Jalan Dewi Sri, Legian, Kuta. Proyek ini dibangun untuk mengantisipasi terjadinya banjir di Legian, Kuta.

Cegah Banjir Legian, Bangun Pompa Air Rp 26 M

MANGUPURA – Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Badung terus berkuat dengan upaya pencegahan banjir di kampung turis, Kuta. Di Jalan Dewi Sri, Legian, kali ini dibangun pompa air raksasa. Proyek pengadaan pompa secara keseluruhan ini menghabiskan dana Rp 26 miliar. Proyek ditarget rampung pada

pertengahan Desember, atau saat musim penghujan tiba.

Kabid Pengairan Dinas BMP Kabupaten Badung, AA Dalem memaparkan, saat ini proyek fokus pada pembangunan rumah pompa. Sementara pompa akan didatangkan dari Surabaya, Jawa Timur. "Rencananya dipasang dua pompa. Kalau tidak ada

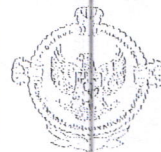
halangan pengerjaannya bisa rampung pada 11 Desember 2015," kata Gung Dalem, kemarin (5/10).

Dikatakan Dalem, pompa untuk mengatasi banjir tersebut bisa menyedot air hingga 1.500 liter per detik untuk satu pompa. Jalan Dewi Sri, Legian selama ini memang kerap menjadi langganan banjir. Saat hujan

tiba, tinggi air bisa mencapai setinggi lutut orang dewasa. Dulunya kawasan Jalan Dewi Sri tersebut adalah loloan dan daerah buangan air. Dengan konsisi sekarang yang sudah banyak bangunan perlu bantuan alat untuk membuang air yang menuju kawasan Dewi Sri ke Tukad Mati sehingga bebas dari banjir. (san/djo)

Edisi : Selasa, 6 Oktober 2015

Hal. : 24



Dua PNS "Makan" Tanah Negara

Lahan Milik Pemprov, Luasnya Puluhan Hektare

GIANYAR - Setelah digeber selama tiga bulan lebih, kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan puluhan hektare lahan Pemprov Bali, dengan modus memalsukan SK (surat keputusan) dan tandatangan bupati Gianyar, akhirnya berlanjut ke tahap penyidikan. Dua oknum pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Bagian Pertanahan dan Bagian Aset Setda Gianyar berinisial NPS dan IBNS, secara resmi menyangkal status tersangka.

Penetapan tersangka terhadap dua pegawai yang "makan" tanah negara, ini disampaikan langsung Kepala Kejari (Kajari) Gianyar Ketut Sumadana, kemarin (5/10).

► Baca Dua... Hal 31

Modus "Makan" Tanah Negara

- Dua oknum pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Bagian Pertanahan dan Bagian Aset Setda Gianyar berinisial NPS dan IBNS memalsukan Surat Keputusan (SK) dan tandatangan Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata terkait puluhan hektare lahan Pemprov yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemkab Gianyar.



- Setelah membuat SK NPS dan IBNS menyewakan lahan-lahan tersebut. Uang hasil sewa dan pungutan liar itu, selanjutnya mereka nikmati sendiri.

- Lahan yang disewakan itu luasnya puluhan hektare yang tersebar di semua kecamatan. Untuk sementara, hasil penelusuran penyidik, ditemukan 60 titik.

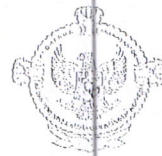
- Beberapa lahan ditemukan sudah mengalami alih fungsi lahan sehingga ada dugaan sudah pindah tangan.

GRAFIS: BUDI NOFIANTO/RADAR BALI



WIDIADNYANA/RADAR BALI

UMUMKAN TERSANGKA: Kepala Kejari Gianyar Ketut Sumadana (paling kiri) menunjukkan stempel palsu milik tersangka "makan" tanah negara, kemarin.



Luas Lahan Bisa Berkembang

■ DUA...

Sambungan dari hal 21

"Hari ini (kemarin, Red) ada banyak kasus yang ingin kami beber. Salah satunya terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi, pada pemanfaatan lahan Pemprov Bali, yang sudah tiga bulan ini masuk dalam penyelidikan dan hari ini resmi masuk penyidikan dengan dua orang tersangka. Mereka adalah NPS dan IB NS," ucapnya.

Diterangkan Sumadana, peningkatan kasus tersebut sesuai dengan sprindik yang dikeluarkan Kejari Gianyar bernomor sprint 2135/P.1.15/FD.1/10/2015 tertanggal 2 Oktober 2015 lalu.

Dalam kasus dugaan korupsi, ini diterangkan titik lahan tersebut berada di puluhan lokasi berbeda. Bahkan, hasil

penelusuran pihaknya, saat ini jumlahnya sudah mencapai 60 lokasi dan kemungkinan jumlah bakal terus bertambah, seiring proses penyidikan yang terus berjalan.

"Jadi, puluhan lahan dengan luas total mencapai puluhan hektare, itu merupakan aset Pemprov Bali. Namun, dalam pengelolaannya diserahkan ke Pemkab Gianyar. Lokasi lahan itu tersebar di semua kecamatan secara merata dengan luas yang berbeda-beda, ada belasan are hingga puluhan are," tambahnya.

Dia menuturkan modus kedua tersangka tersebut dalam melakukan tindakan curas, itu dilakukan dengan membuat SK palsu. Bahkan, yang membuat pihaknya semakin geram, tanda tangan Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata dipalsukan guna melegalkan SK

tersebut. Bukti tanda tangan, itu pun dia tunjukkan kepada awak media, yang berupa tandatangan berwujud stempel dengan bentuk tandatangan yang sama persis.

"Jadi, mereka berdua ini sudah tidak bisa ditoleransi. Berani memalsukan tanda tangan pejabat nomor satu di daerah. Dengan SK palsu ini lah mereka menyewakan lahan-lahan tersebut. Uang hasil sewa dan pungutan liar, itu selanjutnya bukannya disetor ke kas daerah, tapi mereka nikmati sendiri," beber Sumadana, sambil menunjukkan stempel tandatangan palsu itu.

Disinggung mengenai kemungkinan lahan tersebut dijual oleh kedua tersangka ke pihak lain, Sumadana juga menemukan adanya indikasi tersebut. Sebab beberapa lahan

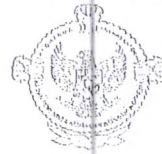
ditemukan sudah mengalami alih fungsi lahan. Sehingga pihaknya sendiri saat ini terus meningkatkan penyidikan, termasuk menyisir ada tidaknya lahan-lahan aset pemerintah yang disalahgunakan melalui SK palsu lengkap dengan tandatangan palsu juga.

"Malah ada yang sudah alih fungsi, ini bisa jadi sudah dijual oleh mereka. Tapi, ini masih dugaan, dan kami masih kembangkan terus. Termasuk memastikan berapa total luas lahan yang mereka salahgunakan, dan kerugian yang ditimbulkan," tegasnya.

"Untuk penyitaan pada lahan-lahan tersebut, karena ini lahan pemerintah tidak kami lakukan penyitaan. Namun, kami tetap mengawasi secara ketat lahan-lahan itu," pungkasnya. (wid/yes)

Edisi : Selasa 0 Oktober 2015

Hal. : 21



HUKUM

Naik 15 Tahun, Candra Kasasi

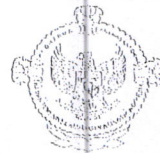
DENPASAR - Banding yang dilakukan mantan bupati Wayan Candra ternyata tidak membuahkan hasil. Sebab, berdasarkan putusan nomor 11/Pid sus-TPK/2015/PT.DPS tertanggal 10 September 2015, hukumannya justru ditambah menjadi 15 tahun penjara. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Denpasar memvonis Candra dalam kasus pengadaan lahan Dermaga Gunaksa tersebut, 12 tahun penjara.

"Dengan kondisi ini kami memohon kasasi," jelas Candra dalam surat kasasi yang diajukan pada 29 September 2015.

Pengacara Wayan Candra Warsa T. Buana membenarkan memang banding dari Candra sudah keluar dan salinannya sudah diterimanya beberapa waktu silam. "Jadinya sekarang sesuai dengan tuntutan jaksa 15 tahun. Naik dari vonis di Tipikor, dari 12 menjadi 15 tahun," ungkap Warsa. (art/yes)

Edisi : Selasa, 6 Oktober 2015

Hal. : 21



Rencana DED Pasar Banyuasri Tertunda

SINGARAJA - Rencana penyusunan detail engineering design (DED) penataan Pasar Banyuasri pada APBD Perubahan 2015 ini, dipastikan batal. Rencana penyusunan DED itu akhirnya direncanakan pada APBD 2016, dan tak menutup kemungkinan penataan Pasar Banyuasri baru akan dilakukan pada tahun 2017 mendatang. Kepastian penundaan itu diungkapkan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Banyuasri, Senin (5/10) pagi kemarin. Dalam sidak itu Agus mengakui jika rencana penyusunan DED baru bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2016 mendatang.

Agus mengaku penundaan penyusunan DED itu tak lepas dari kemampuan anggaran pemerintah daerah pada tahun anggaran 2015 ini. Menurut Agus di tahun 2015 ini, pemerintah memiliki sejumlah proyek dengan nilai puluhan miliar, yang juga harus diselesaikan pada tahun 2015 ini. Sehingga penyusunan DED, mau tidak mau harus ditunda sementara waktu. "Kami juga harus hitung berapa kemampuan anggaran.

Mana yang bisa didukung provinsi atau pusat, itu harus bisa dibaca. Kalau semua dipaksa 2015, dengan kemampuan keuangan kita, ya *nggak* bisa terakomodir semua," kata Agus. Agus menegaskan pihaknya telah menyusun desain kasar rancang bangun revitalisasi Pasar Banyuasri. Nantinya Pasar Banyuasri akan beroperasi selama 24 jam penuh. Pertimbangannya, Pasar Banyuasri memiliki lahan yang lebih luas ketimbang Pasar Anyar Singaraja, serta areal parkir yang lebih luas dan representative.

Nantinya pasar juga akan didesain dengan penerangan yang lebih modern, lapak yang lebih bersih dan higienis, serta akan dibangun escalator pada titik-titik tertentu. Saat ditanya soal pendanaan, Agus mengatakan pihaknya masih menghitung dan membutuhkan persetujuan dari DPRD Buleleng.

"Kemampuan anggaran harus dihitung, *nggak* bisa langsung prestisius. Mana yang bisa direalisasikan 2016, dan mana yang bisa di tahun 2017, itu harus dihitung. Penggunaan juga harus persetujuan dewan, *nggak* bisa bupati itu pakai dana seenaknya, harus ada dukungan dari legislatif," tegasnya. (eps/gup)



EKA PRIASETYA/RADAR BALI

TARIK ULUR: Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (kanan) mengecek DED Pasar Banyuasri.

Edisi : Selasa, 6 Oktober 2015

Hal. : 20